

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan terhadap teori-teori, sebagai landasan penelitian dan berbagai jurnal yang digunakan. Teori yang di sajikan pada tinjauan pustaka menyajikan hubungan antara beberapa konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian yang dilakukan. Sedangkan konsep-konsepnya akan di jelaskan melalaui beberapa variabel penelitian yang akan dikaitkan dengan para peneliti sebelumnya. Teori- teori penjelasan dimulai dari variabel dependen yaitu pengembangan usaha, dilanjut dengan variabel independen yaitu inovasi, peran pemerintah dan literasi keuangan.

2.2.1 Perilaku Keuangan

Shefrin (2000) menyatakan bahwa perilaku keuangan adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Tingkah laku dari para para pemain saham tersebut disebut tingkah laku para praktisi.

Shefrin (2000) menyatakan ada tiga tema yang dibahas dalam perilaku keuangan, dimana tema tersebut dibuat dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Apakah praktisis keuangan mengakui adanya kesalahan karena selalu berpatokan kepada aturan yang telah ditentukan (rules of thumb). Bagi penganut perilaku keuangan mengakuinya sementara keuangan tradisional tidak mengakuinya. Penggunaan rules of thumb ini disebut dengan Heuristics to Process Data. Penganut keuangan tradisional selalu menggunakan alat statistik secara tepat dan benar untuk memperoleh data. Sementara penganut perilaku keuangan melaksanakan rules of thumb seperti 'back-oftheenvelope calculation' dimana ini secara umum tidak sempurna. Akibatnya, praktisi memegang 'biased beliefs' yang mempengaruhi memenuhi janji terhadap kesalahan tersebut. Tema ini dikenal dengan Heuristics-driven bias.

2. Apakah bentuk termsuk inti persoalan (substance) mempengaruhi praktisi? Penganut perilaku keuangan menyatakan bahwa persepsi praktisi terhadap risiko dan tingkat pengembalian sangat dipengaruhi oleh bagaimana ‘decision problem’ dikerangkanya (framed). Sementara penganut keuangan tradisional memandang semua keputusan berdasarkan transparan dan objektif. Tema ini dikenal dengan frame dependence.
3. Apakah kesalahan dan kerangka mengambil keputusan mempengaruhi harga yang dibangun pada pasar? Penganut perilaku keuangan menyatakan ‘heuristics-driven bias’ dan pengaruh framing menyebabkan harga jauh dari nilai fundamentalnya sehingga pasar tidak efisien. Sementara penganut keuangan tradisional mengasumsikan pasar efisien seperti yang diuraikan Fama (1970). Tema ini dikenal dengan pasar tidak efisien (*inefficient market*).

2.1.2 Konsep Pengembangan Usaha

2.1.2.1 Pengertian Pengembangan Usaha

Alyass & Rakib (2017) mendefinisikan pengembangan usaha merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 pada BAB II Pasal 3 ayat 1, bahwa Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Pada ayat 2 disebutkan bahwa, Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, fasilitasi pengembangan usaha dan pelaksanaan pengembangan usaha.

Pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa, Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Lalu, Pada ayat (2) menyebutkan bahwa, Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi

Pada Pasal 5 ayat (1) Pengembangan Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dilakukan melalui

- a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi
- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan dan
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program

Pada ayat (2) disebutkan bahwa, Pengembangan Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. Koperasi
- b. Sentra
- c. Klaster, dan
- d. Kelompok

2.1.2.2 Indikator Pengembangan Usaha

Dalam mewujudkan perkembangan Usaha Kecil dan Menengah, maka harus memiliki tolak ukur agar perkembangan usaha dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Budiarto (2015 hlm. 99), hal-hal yang dapat dijadikan sebagai indikator mengenai pengembangan usaha antara lain adalah

- a. Pasar

Khusus untuk UKM di Indonesia dengan problem-problem spesifik mereka, upaya perkuatan pasar ini diprioritaskan terutama untuk menembus pasar yang ada dan memperkecil *barrier to entry* untuk masuk pasar, dengan cara meningkatkan akses informasi pasar, pemenuhan standar kualitas pasar, peluncuran produk inovatif sesuai selera pasar, pengembangan/ perluasan konsumen sasaran.

- b. Teknologi dan inovasi

Teknologi dapat membantu dalam pengemasan / pembungkusan (*packaging*) agar tetap baik / utuh, tahan lama dan menarik bagi konsumen. Teknologi, khususnya teknologi informasi, juga dapat digunakan dalam memasarkan produk melalui *electronic mail* dan *website*. Inovasi dapat dilakukan dengan membuat produk baru yang bisa

memanfaatkan teknologi yang sudah ada atau teknologi yang seluruhnya baru sama sekali.

c. Permodalan

Dalam rangka meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi usaha, salah satu faktor penunjang yang cukup penting adalah ketersediaan modal yang memadai, untuk itu diperlukan adanya sistem kredit/ pembiayaan yang mampu menjangkau lapisan masyarakat terbawah dan pada saat yang bersamaan mendinging kesiapannya untuk meningkatkan kinerja (*performance*) usahanya sehingga lambat laun menjadi layak mengakses kredit/ pembiayaan di bank (*bankable*)

d. Manajemen

Manajemen merupakan salah satu unsur terpenting dalam penciptaan, pengembangan dan pengelolaan UKM.

Menurut wanita (2015), indikator pengembangan usaha terbagi menjadi 2 antara lain adalah

- a. Pendapatan dari hasil penjualan / omzet
- b. Penambahan jenis/ ragam jumlah dagangan
- c. Kemampuan untuk memperkerjakan orang dan menggajinya

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan usaha adalah wujud tindakan dalam meningkatkan kemampuan secara konseptual, teknis dan sikap pada suatu usaha. Pengembangan usaha dalam penelitian ini mengacu pada indikator menurut Budiarto (2015 hlm. 99) yaitu pasar, teknologi / inovasi, permodalan dan manajemen.

2.1.3 Konsep Literasi Keuangan dan Pengembangan Usaha

2.1.3.1 Pengertian Literasi Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 menyatakan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Menurut Widayanti & Marwanti (2017), pengetahuan mengenai keuangan atau financial literacy yang baik merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Manfaat dari memiliki pengetahuan agar individu memiliki perencanaan keuangan yang baik dan terhindar dari masalah keuangan

(Suryani & Ramadhan, 2017) menegaskan, ‘literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap keuangan’

(Aribawa, 2014) menegaskan, tingkat literasi keuangan dari sudut pandang perorangan atau keluarga dapat memiliki dampak pada kemampuan untuk memiliki tabungan jangka panjang yang digunakan untuk memiliki aset (seperti tanah atau rumah), pemenuhan pendidikan tinggi dan dana hari tua (pensiun).

2.1.3.2 Indikator Literasi Keuangan

Menurut (Anggraeni, 2016), indikator literasi keuangan antara lain adalah:

1. Pengetahuan umum perbankan
2. Literasi keuangan dasar
3. Sikap keuangan pemilik
4. Keterampilan keuangan pemilik

Menurut Aribawa (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa indikator literasi keuangan antara lain adalah :

1. Kepemlikikan rekening atas nama perusahaan
2. Identifikasi perusahaan saat pembukaan rekening
3. Setoran dana minimal saat pembukaan rekening
4. Pengetahuan tentang jaminan tabungan
5. Kepemahaman tentang potensi imbal hasil tabungan dalam satu tahun
6. Kepemahaman tentang potensi imbal hasil tabungan dalam multi tahun
7. Kepemahaman tentang perhitungan bunga kredit per tahun
8. Pengetahuan tentang premi di antara dua pilihan produk
9. Pengetahuan tentang pengaruh inflasi terhadap nilai uang
10. Pengetahuan tentang pengaruh inflasi terhadap nilai uang

2.1.3.3 Literasi Keuangan dalam Pengembangan Usaha

Menurut Resmi dkk, (2019), literasi keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha. Kemampuan keuangan yang memadai akan membantu manager menentukan keputusan bisnis yang kritis dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam masa krisis sehingga usaha berkembang dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Lusimbo & Muturi (2016), salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan usaha adalah literasi keuangan. Tanpa adanya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pengetahuan dasar keuangan, maka masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengusaha yang memiliki pengetahuan dan dana terbatas tidak dapat melakukan pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, pentingnya Usaha Kecil dan Menengah untuk memiliki pengetahuan dan dana yang memadai tidak boleh dianggap enteng. Literasi keuangan dalam penelitian ini mengacu pada indikator menurut Anggraeni (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa indikator literasi keuangan antara lain adalah literasi keuangan dasar, sikap keuangan pemilik, keterampilan keuangan pemilik.

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian menurut Owusu *et al.*, (2019), menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UKM. Nelima (2019), menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah.

Dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha. Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa ;

H1 : literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

2.1.4 Konsep Inovasi dan Pengembangan Usaha

2.1.4.1 Pengertian Inovasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang

berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).

Sibarani dkk, (2019 hlm. 28) menegaskan, ‘inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum ada atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang membuat inovasi)’.

2.1.4.2 Indikator Inovasi

Menurut Desmaryani (2017 hlm. 4), indikator inovasi terbagi menjadi 3 :

a. *Product line extensions*

Perluasan lini produk adalah produk-produk yang relative baru dipasar namun tidak baru lagi bagi perusahaan.

b. *Me too product*

Me too products adalah produk yang relative baru bagi perusahaan, namun sudah dikenal dipasar.

c. *New to the world product*

New to the world adalah produk baru bagi perusahaan maupun bagi perusahaan.

Menurut Handini dkk, (2019 hlm. 78) indikator inovasi juga terbagi menjadi tiga bagian :

a. Riset Produk

b. Pelatihan dan Pengembangan

c. Diferensiasi Produk

2.1.4.3 Inovasi dan Pengembangan Usaha

Menurut Suryono & Dodik (2017), menyatakan bahwa inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap daya saing, inovasi produk berpengaruh terhadap UKM naik kelas . Inovasi merupakan pijakan bagi UKM untuk mencapai tingkat daya saing yang kompetitif, terlebih lagi bagi UKM yang bergerak di industri kreatif. Inovasi produk melalui Keunggulan produk, Keunikan produk, kemasan produk dan Efisiensi biaya, dengan pengusaha memproduksi produk menggunakan teknologi dan pengusaha memasarkan produk menggunakan teknologi mampu

mampu meningkatkan daya saing melalui imitabilitas, durabilitas, kemudahan menyamai dan pemasaran, dengan memasarkan produk dengan baik dan mendekatkan produk secara prinsip dengan konsumen sehingga mampu mendorong UKM naik kelas melalui peningkatan omset, jumlah karyawan dan Asset dengan bertambahnya jumlah karyawan dan ditingkatkannya sumberdaya karyawan.

Menurut Novitasari (2017), menyatakan bahwa inovasi berpengaruh positif dan tinggi terhadap pertumbuhan usaha, artinya jika inovasi naik maka pertumbuhan usaha juga naik, sebaliknya jika inovasi menurun maka pertumbuhan usaha juga menurun.

Menurut Mohammad et al (2019), menyatakan bahwa inovasi berpengaruh positif terhadap UKM. Melalui inovasi tinggi yang dimiliki pemilik usaha, dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan teknologi, memiliki kualitas dan standar perusahaan, dapat bekerja sesuai dengan perencanaan, dan menawarkan promosi yang menarik. Melalui proses ini, usaha kecil dan menengah terbukti mampu mengembangkan teknologi sebagai alat untuk mempromosikan bisnis mereka dan memiliki kualitas dan standar yang baik sehingga mereka dapat bertahan dalam bisnis mereka.

Menurut Omar & Nazri (2016), menyatakan bahwa inovasi berpengaruh positif terhadap pengembangan UKM. Inovasi penting untuk sebuah UKM, Kemampuan inovasi dapat menyebabkan dampak positif pada kinerja UKM, khususnya ketika UKM, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, mengeksplorasi ide-ide baru; mengembangkan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu; terlibat dalam pengembangan produk baru; dan menjadi kreatif dalam operasi. Selain itu, kemampuan UKM untuk menciptakan pengetahuan juga penting untuk kemampuan inovasinya. Keempat, penciptaan pengetahuan melalui sosialisasi dan eksternalisasi pengetahuan dan eksploitasi diam-diam melalui kombinasi dan internalisasi pengetahuan eksplisit harus dilakukan dalam konteks di mana penggunaan pengetahuan tersebut diberikan makna dan makna. Pasar menjadi konteks inovasi yang relevan untuk UKM karena inovasi didefinisikan sebagai ide-ide baru yang telah dikomersialkan sebagai produk atau diimplementasikan sebagai proses. Terakhir, UKM harus proaktif dan memelihara

lingkungan yang memungkinkan yang memfasilitasi pembelajaran, manajemen pengetahuan dan kemampuan inovasi di antara karyawan agar relevan dan berkelanjutan di pasar yang kompetitif saat ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa usaha yang memiliki inovasi dan mempraktekkan inovasinya pada produk barang/ jasa maka usahanya akan bertumbuh. Inovasi dalam penelitian ini mengacu pada indikator menurut Desmaryani (2017 hlm. 4) yaitu *product line extensions, me too product*, dan *new to the world product*..

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian menurut Tehseen & Sajilan (2016), menjelaskan bahwa inovasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UKM. Novitasari (2017), menunjukkan bahwa inovasi berpengaruh positif dan tinggi terhadap pertumbuhan UKM.

Dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa inovasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha. Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa ;

H2 : inovasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

2.1.5 Konsep Peran Pemerintah dan Pengembangan Usaha

2.1.5.1 Pengertian Peran Pemerintah

(Obaji, 2014) menegaskan, ‘pemerintah merupakan landasan yang mendorong berkembangnya kewirausahaan suatu negara’

Menurut Nirwana & Hasanudin (2017), peran pemerintah terbagi menjadi 2, peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memfasilitasi usaha untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh usaha. Peran pemerintah sebagai regulator adalah pembuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan pembinaan dan pengembangan usaaga, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah usaha, agar tumbuh dan berkembang dengan mudah.

Kebijakan pemerintah untuk membiayai kewirausahaan di Indonesia bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Kredit Usaha Rakyat adalah program prioritas kebijakan pemerintah dalam hal pemberian kredit/pembiayaan kepada wirausaha. Individu/ perseorangan atau badan hukum yang melakukan

usaha produktif sebagai penerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan sumber dana 100% dari dana penyaluran program berdasarkan 9% suku bunga efektif per tahun atau sama dengan suku bunga flat yang setara. Tujuannya sesuai dengan UU No.20 sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan para pelaku UKM.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti di Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Timur, didapatkan hasil bahwa pemerintah daerah telah menerapkan berbagai program sebagai wujud upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM, PKT (Pengembangan Kewirausahaan Terpadu), program ini merupakan program untuk para pelaku UKM ataupun calon pelaku UKM. Program tersebut memiliki 7 langkah yang dinilai dapat mengatasi masalah yang terjadi pada UKM. Langkah tersebut antara lain adalah:

- a. P1 = Pendaftaran
- b. P2 = Pelatihan
- c. P3 = Pendampingan
- d. P4 = Perizinan
- e. P5 = Pemasaran
- f. P7 = Pembukuan, dan
- g. P8 = Permodalan

Program tersebut berlaku bagi setiap warga yang memiliki KTP domisili Jakarta yang ingin mendirikan usaha atau yang telah mendirikan usaha

2.1.5.2 Indikator dalam Peran Pemerintah

Menurut Obaji (2014), indikator kebijakan pemerintah antara lain adalah:

- a. *Supportive government policies/* kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah adalah pemimpin dari pembentukan, pensponsoran dan administrasi dari sebagian besar program pendukung, terutama di negara-negara berkembang, sebuah kebijakan dari pemerintah terkait dengan kewirausahaan akan berjalan untuk memastikan keberlanjutan dan praktik kewirausahaan yang positif.

b. *Policy implementation*/pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan dengan memetakan kursus dan memberikan pemahaman untuk implementasi program pemerintah. Ini memandu pemikiran pemerintah dalam pelaksanaan suatu program dan menentukan arahnya.

c. *Government funding*/dana dari pemerintah.

Aksesibilitas layanan moneter adalah salah satu faktor penting bagi keberlanjutan keberadaan mayoritas perusahaan yang baru dibentuk serta elemen penting dalam praktik kewirausahaan. Untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan, harus ada pola pendanaan di mana program dukungan dana secara terus-menerus.

Menurut Arwan *et al.* (2018), indikator peran pemerintah adalah :

1) Fasilitator

Fasilitator dalam pelatihan kewirausahaan.

2) Katalisator

Katalisator dalam pemberdayaan dan pemodalan komunitas kreatif.

3) Regulator

Regulator dalam kebijakan yang mempermudah berkembangnya kreatifitas berusaha dan berinvestasi.

2.1.5.3 Peran Pemerintah dan Pengembangan Usaha

Menurut (Arwan *et al.*, 2018), peran pemerintah dalam pengembangan usaha ditunjukkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia.

Menurut Desmaryani (2017), dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha. Pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dan melakukan fungsi Pengawasan. Pemerintah mendukung pertumbuhan usaha melalui edukasi dan pelatihan, pemerintah membantu memasarkan produk melalui kemitraan, dan kebijakan mengenai pemberian pinjaman modal.

Menurut Obaji (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha. Pemerintah mengatur dan meningkatkan kondisi UKM dalam hal kebijakan dan pendanaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang terkait dengan praktik kewirausahaan ditujukan untuk mendorong kewirausahaan dengan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi wirausaha. Peran pemerintah dalam penelitian ini mengacu pada indikator menurut Obaji (2014) yaitu kebijakan pemerintah, pelaksanaan kebijakan dan dana dari pemerintah.

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian menurut Tomasz *et al.*, (2013), menjelaskan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UKM. Obaji & Olugu (2014), menunjukkan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif dan tinggi terhadap pertumbuhan UKM.

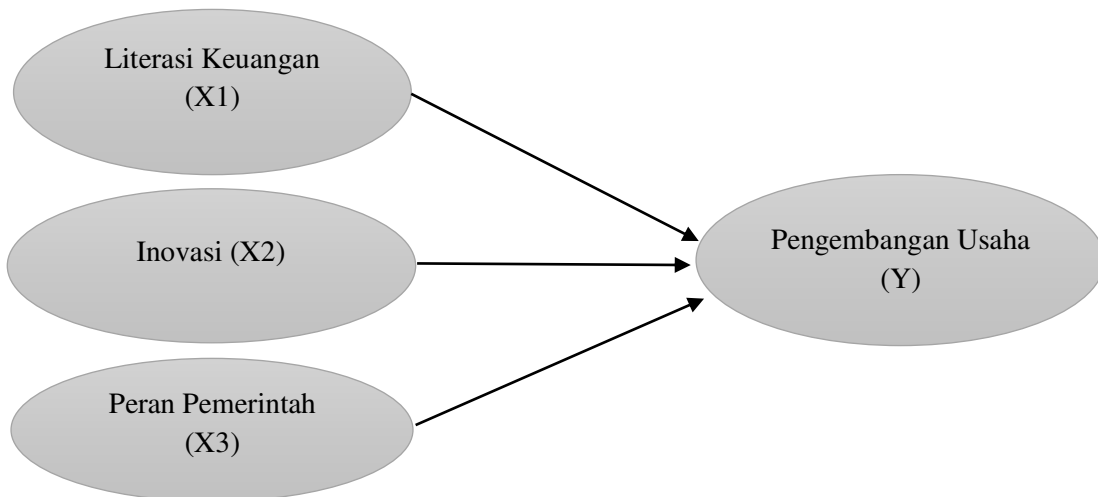
Dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha. Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa ;

H3 : peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

2.2 Model Penelitian

Model penelitian bertujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah dalam sebuah penelitian, dalam model penelitian tersebut terdapat variabel literasi keuangan, inovasi, dan peran pemerintah yang mempengaruhi variabel pengembangan usaha. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh inovasi, peran pemerintah dan literasi keuangan terhadap pengembangan usaha pada UKM.

Model penelitian ini dibuat berdasarkan variabel independen dan variabel dependen yang dimasukan dalam penelitian ini serta alat uji hipotesis yang digunakan. Model penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Model Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu dan kerangka model penelitian yang telah dibuat peneliti, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Literasi Keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap Pengembangan Usaha, sehingga semakin tinggi Literasi Keuangan maka semakin pengembangan usaha meningkat.
- H2 : Inovasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pengembangan Usaha, sehingga semakin tinggi Inovasi maka Pengembangan Usaha akan meningkat.
- H3 : Peran Pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap Pengembangan Usaha, sehingga, semakin tinggi Peran Pemerintah maka Pengembangan Usaha akan meningkat